



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
Nomor : B-54/OT.210/H.10.3/1/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 undang undang Nomor 14 tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian
7. Pertanian;
- Keputusan Kepala Biro hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi
8. Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian ;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai Pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penanggung jawab dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki

seperlunya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai,



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 :

Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Nomor : B-54/OT.210/H.10.3/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Daftar Informasi Publik PPID
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Tahun 2026

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
1.	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
2.	Struktur Organisasi, Gambaran umum, Visi-Misi, Profil singkat pejabat struktural, Tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
3.	Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
4.	Aset Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
6.	Peraturan Pemerintah	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
7.	Statistik Kepegawaian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
8.	Laporan Keuangan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
9.	SK PPID	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
10.	Daftar Pegawai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
11.	Profil SDM Fungsional	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
12.	Surat Keputusan Kepala Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
13.	Pedoman Mutu Balai	Balai Perakitan dan Pengujian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Lingkungan Pertanian						
14.	Formulir Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
15.	SOP	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
16.	Sertifikat Akreditasi SNI ISO 9001:2015	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	3 Tahunan	Berkala
17.	Informasi Kegiatan Yang telah diperiksa Itjen	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
18.	Laporan Tahunan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
19.	LAKIN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
20.	Matrik program 2020-2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
21.	Renstra 2020-2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
22.	Rencana Kerja Tahunan 2023-2026	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
23.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
24.	Pagu Anggaran	Balai Perakitan dan Pengujian	Tim Kerja Program dan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
19.	LAKIN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
20.	Matrik program 2020- 2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
21.	Renstra 2020-2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
22.	Rencana Kerja Tahunan 2023-2026	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
23.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
24.	Pagu Anggaran	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
25.	Realisasi Anggaran	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
26.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
27.	Daftar Kerja Sama	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
28.	Laporan Bulanan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
29.	Rencana atau target Kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun (RKT)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
30.	Daftar Informasi Publik	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
31.	Daftar HAKI	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
32.	IKM	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
33.	Laporan PPID	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
34.	Panduan Mutu Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
35.	Instruksi Kerja Metode Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
36.	Formulir Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
37.	Sertifikat Hasil Uji Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	2 Tahunan	Setiap saat
38.	Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
39.	Maklumat Pelayanan	Balai Perakitan dan Pengujian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Lingkungan Pertanian						
40.	Hasil Inovasi Teknologi (Produk)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
41.	Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
42.	Tarif Layanan PNB (PP Nomor 28 Tahun 2023)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
43.	Daftar Parameter dan Harga Uji Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2026, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala



 Kepala Balai,
 LUTEL IZHAR
 NIP 197411281999031002

Lampiran 2 :
 Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Nomor : B-54/OT.210/H.10.3/1/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Rekaman Mutu Balai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • SNI ISO 9001:2015 klausul 7.5 (pengendalian informasi terdokumentasi) 	-	Potensi disalahgunakan	Menjaga integritas sistem mutu
2.	Rekaman Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 4.2 Kerahasiaan • Peraturan Menteri Perdagangan 	-	Data laboratoium dapat disalahgunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan data laboratorium terjamin • Meningkatkan kepercayaan pelanggan laboratorium

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium			
3.	Prosedur Mutu Balai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, f, h 	-	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan kerahasiaan teknis Risiko disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kerahasiaan Memperkuat perlindungan hukum dan audit
4.	Dokumen Prosedur Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	-	<ul style="list-style-type: none"> Membuka rahasia metode Rawan disalahgunakan pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga daya saing Melindungi reputasi laboratorium.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2, 4.1.5 Kerahasiaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan daya saing. 	
5.	Daftar Induk Dokumen Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 • SNI ISO/IEC 17025: 2017 klausul 4.2 Kerahasiaan 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka rahasia metode • Rawan disalahgunakan pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kelancaran sistem mutu • Mendukung integritas akreditasi • Mencegah manipulasi.
6.	Instruksi Kerja Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 Kerahasiaan 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka rahasia metode • Rawan disalahgunakan pihak luar • Menurunkan daya saing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin keselamatan alat, • Mendukung integritas akreditasi • Mencegah penyalahgunaan.
7.	Instruksi Kerja Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka rahasia metode 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin keselamatan alat, • Mendukung integritas akreditasi • Mencegah penyalahgunaan.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 Kerahasiaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Rawan disalahgunakan pihak luar • Menurunkan daya saing. 	
8.	<p>Hasil pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara 	<p>Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain • Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature • Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara • Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin independensi pemeriksaan, menjaga obyektivitas hasil audit, mendukung integritas lembaga.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
				<p>dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkapkan surat – surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK RI dan BPKP. 	
9.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 6, asas kerahasiaan) 	Sampai dengan proses selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat • Risiko kolusi • Intervensi eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin persaingan sehat • Menjaga keadilan • Mencegah tekanan pihak luar.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		<ul style="list-style-type: none"> PerLKPP No. 12 Tahun 2021 (Etika Pengadaan) 			
10.	Data Pegawai Daftar riwayat hidup pegawai Biodata pegawai elektronik dan non elektronik Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4) pegawai Hasil general checkup kesehatan pegawai Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara UU 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	-	Penyalahgunaan identitas, risiko peretasan, potensi ancaman fisik & psikis, pelanggaran hak privasi.	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi pegawai Mendukung keamanan data, Menjaga keselamatan individu.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
	Rekomendasi tim etika Izin perkawinan/ perceraian Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN (Pasal 63) 			


 Kepala Balai,
LUFFI IZHAR
 NIP. 1974311281999031002